

---

# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBYEK DAYA TARIK WISATA

Aida Fitriani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas  
Jalan YC. Oevang Oeray Nomor: 92 Baning Kota Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia  
Email: aidafitriani45@gmail.com

**Abstract:** *The development of tourist attraction objects must be supported by a strong commitment to make it happen. Accessibility and transportation networks are still limited, marketing and promotions are not yet optimal, limited human resources and inadequate budgets are certainly obstacles. Other aspects relate to institutions (apparatus' understanding of the concept and definition of tourist areas as well as coordination between related agencies), policies and regulations for managing tourist areas (local, regional, national and international levels) and human resources for managers and participation of local residents in area management. tourism, the condition of facilities and infrastructure, and the condition of the tourist objects that will be developed are also significant factors.*

**Keywords:** *Policy; Development; Tourist Attractions.*

**Abstrak:** Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata harus didukung adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Masih terbatasnya Aksesibilitas dan Jaringan Transportasi, belum optimalnya Pemasaran dan Promosi, terbatasnya Sumber Daya Manusia serta Anggaran yang belum memadai tentu menjadi kendala. Aspek lain yang berhubungan dengan kelembagaan (pemahaman aparatur terhadap konsep dan definisi kawasan wisata serta koordinasi antar instansi terkait), kebijakan dan regulasi pengelolaan kawasan wisata (tingkat lokal, daerah, nasional dan internasional) dan Sumber daya manusia pengelola serta partisipasi penduduk lokal dalam pengelolaan kawasan wisata, kondisi sarana dan prasarana, dan kondisi objek wisata yang akan dikembangkan juga merupakan faktor yang signifikan.

**Kata Kunci:** Kebijakan; Pengembangan; Obyek Wisata.

## PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata meliputi beberapa aspek yaitu: industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Pengertian dari destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu/lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terikat dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan, sedangkan Industri pariwisata meliputi: Pengusaha pariwisata, Asosiasi usaha

pariwisata, Asosiasi profesi, Asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

Arah kebijakan pada peningkatan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, pengembangan kualitas produk, terkait dengan pembangunan berkelanjutan, harmonisasi perangkat peraturan, dan optimalisasi pengelolaan jasa dan pelayanan pariwisata. Kebijakan dari rencana pengembangan pariwisata jangka menengah yaitu: Membangun pariwisata nasional memupuk persatuan dan cinta tanah air. Peningkatan pembangunan pariwisata berkelanjutan

dan bertanggung jawab. Peningkatan daya saing ditingkat global. Pemantapan peran dan posisi Indonesia dalam persahabatan dan kerjasama internasional bidang budaya dan pariwisata. Peningkatan penelitian pengembangan sistem informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Pengembangan sumber daya manusia. Pemantapan manajemen pembangunan yang transparan dan akuntabel. Peningkatan daya saing destinasi pariwisata, Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pemasaran terpadu, baik diluar negeri maupun dalam negeri (*tourism trade investment*).

Peningkatan kualitas pelayanan informasi pariwisata. Pengembangan SDM (standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi). Sinergi multi-stakeholder sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Pengembangan destinasi pariwisata Indonesia terbagi atas Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia. Wilayah KBI di kembangkan wisata-wisata: MICE, belanja, budaya, ekowisata, bahari, ziarah, dan niche product seperti golf, petualangan, kuliner, dan lain-lain. KTI dikembangkan wisata bahari, ekowisata, budaya, MICE, ziarah, dan niche product seperti petualang, kuliner, geowisata dan lain-lain. Pengembangan pariwisata daerah mengangkat kekayaan budaya dan keberagaman pesona keindahan alam.

Menurut Yoeti (2000:42) perkembangan kawasan wisata memiliki kriteria khusus. Beberapa aspek perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan merumuskan kebijakan pengembangan kawasan wisata adalah: cara pengelolaan,

pengusahaan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Daerah-daerah dijadikan kawasan wisata khususnya ekowisata adalah Daerah atau wilayah yang diperuntukan sebagai kawasan pemanfaatan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan tersebut. Daerah/zona pemanfaatan kawasan taman nasional. Daerah pemanfaatan untuk wisata berburu berdasarkan rencana pengelolaan kawasan taman perburuan.

Menurut Taroepratjeka (dalam Yoeti, 2001:151) perencanaan dan pembangunan kepariwisataan perlu dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen menentukan dan menunjang keberhasilan seperti: objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, tenaga listrik, air bersih, industri cinderamata, kegiatan koperasi maupun peranan swasta dan masyarakat luas. Semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan dan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Hidayati dkk (2003:9) perkembangan kawasan pariwisata secara konvensional menumbuhkan dampak atau pengaruh negatif yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut: Aspek ekologi. Yaitu terjadinya perubahan setting lokasi wisata (*landscape*), perubahan ekosistem maupun berkurangnya keanekaragaman hayati. Aspek Ekonomi. Yaitu dapat menyebabkan terjadinya inflasi di lokasi wisata. Aspek sosial budaya. Dampak pariwisata terhadap aspek sosial budaya kurang diperhatikan. Pariwisata dapat

menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan hidup masyarakat yang berdampak pada marginalisasi penduduk. Selain itu, terjadinya infiltrasi budaya luar/asing yang masuk terkadang tidak sesuai dengan budaya setempat.

Perubahan aspek ekologi, disebabkan oleh fokus pariwisata menitikberatkan pada keuntungan ekonomi. Peningkatan jumlah wisatawan yang datang berarti peningkatan ekonomi. Hal ini mendorong pembangunan fasilitas wisata yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan wisatawan walaupun terkadang tidak ramah lingkungan dan penduduk lokal. Disamping itu, jumlah wisatawan dan aktivitas wisata seringkali melebihi kapasitas daya dukung lingkungan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Perubahan aspek ekonomi disebabkan karena pelaku bisnis menetapkan harga yang sama untuk wisatawan dan penduduk lokal yang berimplikasi pada peningkatan biaya hidup penduduk lokal. Selain itu, dari sisi ketenagakerjaan pariwisata merupakan sektor yang padat karya, tetapi penyerapan tenaga kerja seringkali tidak dapat mengakomodasikan penduduk lokal. Hal ini disebabkan oleh alasan kurangnya pendidikan dan keterampilan kepariwisataan yang dimiliki oleh penduduk lokal. Pariwisata juga dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian penduduk lokal. Penduduk lokal terpaksa berpindah pekerjaan karena kurangnya akses untuk melakukan pekerjaan. Hal ini akan merugikan penduduk lokal, karena berpindah pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Ketergantungan sektor pariwisata pada

musim liburan membuat penduduk lokal yang berkeja disektor ini terpaksa menganggur pada musim sepi pengunjung

Kebijakan pengembangan kawasan atau wilayah pada prinsipnya mengandung pengertian sebagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di suatu wilayah tertentu. Tujuan pengembangan kawasan atau wilayah mengandung dua dimensi yang saling berkaitan. Secara sosial ekonomi pengembangan wilayah adalah upaya memberikan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat secara ekologi pengembangan wilayah juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan sosial budaya.

Menurut Prod'homme (dalam Triutomo, 2001:50) pengembangan wilayah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya yang ada serta kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Dari pengertian tersebut menurut Triutomo (2001:51) tersirat adanya beberapa aspek yang harus terdapat dalam pengembangan wilayah yaitu: Program yang menyeluruh dan terpadu, Sumberdaya yang tersedia dan kontribusinya terhadap wilayah yang bersangkutan, Suatu wilayah tertentu.

Menurut MT Zen (dalam Triutomo, 2001:51) pengembangan wilayah akan sangat tergantung pada tiga unsur pokok yaitu: ketersediaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Berkembangnya suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pemanfaatan dari ketiga sumberdaya tersebut, sehingga upaya

pengembangan yang harus dilakukan akan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Menurut Haeruman dan Triutomo (2000:194), adapun karakteristik suatu kawasan tertentu termasuk kawasan wisata dapat dikembangkan adalah: mempunyai potensi sumberdaya yang besar pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, demografi, politik dan hankam serta pengembangan wilayah sekitarnya, mempunyai dampak penting baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun kegiatan lainnya, merupakan faktor yang mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan maupun wilayah sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh wilayah sekitarnya baik dalam lingkup nasional maupun regional, mempunyai dampak terhadap kondisi politik dan pertahanan keamanan nasional serta regional.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hidayati dkk (2003:16) pengembangan kawasan wisata harus memperhatikan 6 (enam) prinsip dasar yaitu: Memberikan dampak negatif yang paling minimum bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan baik bagi penduduk lokal maupun pengunjung. Berfungsi sebagai lahan untuk pendidikan dan penelitian baik untuk penduduk lokal maupun pengunjung. Semua elemen yang berkaitan harus memberi dampak positif berupa kontribusi langsung dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Memaksimalkan partisipasi masyarakat lokal pada proses pengambilan keputusan

berkaitan pengelolaan kawasan wisata. Memberi manfaat ekonomi bagi penduduk lokal berupa kegiatan ekonomi yang bersifat komplementer terhadap kegiatan ekonomi tradisional (bertani, berladang, mencari ikan, beternak dan sebagainya).

Menurut Nagib (dalam Daliyo, 2003:2) sektor pariwisata merupakan sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi, karenanya berperan strategis dalam menangani permasalahan ekonomi maupun sosial. Kegiatan wisata disuatu tempat/wilayah biasanya bergerak cepat dan dinamis serta memiliki *multiplier effect* yang cukup besar terhadap perkembangan sektor lainnya seperti sektor perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan pendidikan. Kondisi sosial budaya masyarakat suatu wilayah merupakan faktor penting dalam menunjang perkembangan pariwisata di wilayah tersebut. Salah satu diantaranya adalah sikap kepedulian masyarakat setempat terhadap perkembangan pariwisata di daerahnya sehingga dapat menerima pariwisata sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Kondisi sosial budaya masyarakat dapat dilihat dari struktur masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan baik ditingkat penyusunan paket-paket wisata maupun keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pariwisata (Nagib dalam Daliyo, 2003:15).

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam kegiatan pariwisata, baik yang menyangkut perluasan kesempatan kerja maupun peningkatan kualitas tenaga kerja. Meskipun terdapat

kesulitan dalam menghitung jumlah kesempatan kerja kegiatan pariwisata, namun tidak dapat disangkal bahwa kesempatan kerja yang tercipta dari kegiatan pariwisata sangat luas, baik yang langsung sebagai pelaku pariwisata maupun lapangan usaha dari sektor-sektor terkait (Nagib, dalam Daliyo, 2003:22).

Menurut Tlusty (dalam Wahab, 2003:90) suatu analisis mengenai dampak kesempatan kerja pariwisata paling tidak meliputi 2 aspek yaitu: Kesempatan kerja langsung, yaitu jumlah alokasi orang-orang yang bekerja secara langsung pada sektor pariwisata tersebut. Kesempatan kerja tidak langsung yaitu kesempatan kerja yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan pariwisata itu sendiri.

Menurut Yoeti (2000:42) kriteria pengembangan kawasan wisata atau ekowisata harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Kelayakan pasar dan kapasitas kunjungan. Tersedianya asesibilitas yang memadai ke daerah tersebut. Potensi yang dimiliki daerah untuk dijadikan kawasan wisata atau ekowisata. Pendukung pengembangan wilayah lain di daerah tersebut. Memberi peluang bagi pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Masyarakat Ekowisata Indonesia (MEI) memberi kriteria pemilihan lokasi sebagai berikut: Daerah itu harus memiliki keunikan khusus yang tidak terdapat di daerah lain. Memiliki atraksi seni budaya yang unik dan berbeda dengan suku bangsa lainnya. Adanya kesiapan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam proyek yang

dibangun. Peruntukan kawasan tidak meragukan. Tersedia sarana akomodasi, rumah makan dan sarana pendukung lainnya. Tersedianya asesibilitas yang memadai dan membawa wisatawan atau pengunjung dari dan ke kawasan yang dikembangkan.

Sejalan dengan semangat penerapan otonomi daerah, maka kewenangan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah semakin luas. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan pembangunan sektor kepariwisataan. Strategi pengembangan kepariwisataan berdasarkan kawasan pengembangan menurut Nagib (dalam Daliyo, 2003:21) dapat dijabarkan dalam 8 (delapan) komponen yaitu: Komponen objek dan daya tarik wisata. Komponen akomodasi. Komponen sarana dan prasarana transportasi. Komponen Sumber Daya Manusia (SDM). Komponen kelembagaan. Komponen fasilitas penunjang untuk meningkatkan pelayanan pariwisata. Komponen promosi dan pariwisata. Komponen lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Taroepratjeka (dalam Yoeti, 2001:151) menyatakan pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk keindahan alam, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan budaya serta peninggalan sejarah purbakala. Keterpaduan objek dan daya tarik wisata dengan pengembangan jasa usaha dan sarana pariwisata berfungsi sebagai daya tarik wisatawan maupun pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

## **METODE PENELITIAN**

Dilihat dari substansinya, penelitian ini pada dasarnya adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah "suatu penelitian yang hendak melakukan penilaian tentang sesuatu hal dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungannya antar fakta". Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai sasaran atau mengenai bidang tertentu, serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang nyata. Informan penelitian adalah Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Melawi. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Melawi. Pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Melawi. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan Studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melawi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan objek daya tarik wisata, aspek yang menjadi pertimbangan adalah mengenai lingkungan eksternal maupun internal mempengaruhi kegiatan

pariwisata yang ada di Kabupaten Melawi. Dikatakan Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Melawi, adapun lingkup eksternal yang dapat menjadi peluang pengembangan objek daya tarik wisata di Kabupaten Melawi adalah: Industri pariwisata yang bergerak ke pariwisata berkelanjutan dan bersahabat dengan alam, sehingga layak untuk dikembangkan, seiring dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Melawi berupa Hutan, Kebun, dan agro, dan unsur alam lainnya. Selain itu, Rencana strategis pariwisata, komitmen, disertai dengan rencana lainnya yang ditetapkan baik pemerintah pusat maupun propinsi yang mendukung kegiatan pariwisata, Keberadaan lahan dan kesempatan pengembangan yang ada di Kabupaten Melawi, Atraksi dan kebudayaan yang beragam di Kabupaten Melawi, serta kondisi yang masih alami, Pengetahuan dan informasi akan wisatawan utama dan potensial, Atraksi yang tersebar di beberapa wilayah, dapat membuka akses ke daerah lain, Rencana yang akan dikembangkan sebagai arahan dan kebijakan di sektor pariwisata khususnya Kabupaten Melawi pada periode tertentu.

Selain peluang didapati, ancaman bisa dipertimbangkan dalam rencana pariwisata di Kabupaten Melawi antara lain adalah: Kerusakan lingkungan, keramaian kedatangan wisatawan tidak sesuai dengan kapasitas, tidaknyaman keadaan, panas, bising, dan kotor; Masuknya kebudayaan asing dengan belum siapnya masyarakat untuk menyaringnya, sehingga kecintaan terhadap budaya sendiri dapat mulai

hilang; Masyarakat menjadi penonton di daerah sendiri dengan banyaknya unsur vital pariwisata yang mungkin dimiliki orang lain; Rusaknya benda-benda cagar budaya; Pembangunan fasilitas pariwisata yang seporadis, tidak ikutserta masyarakat setempat pembangunan dan pengembangan; Adanya kesamaan atraksi pariwisata dengan daerah lain baik didalam propinsi maupun di Pulau Kalimantan, sehingga atraksi yang ditawarkan tidak orisinal dan biasa saja; Pengalokasian investasi pariwisata yang cukup besar. Hambatan lain yaitu masih terbatasnya SDM dibidang pariwisata khususnya dalam pemerintahan dan swasta, serta fasilitas pendidikan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dan mengarah pada kegiatan pariwisata seperti SMA kejuruan, akademi, Program Studi Universitas.

Kekuatan patut dipertimbangkan dalam rencana pariwisata di Kabupaten Melawi antara lain adalah: Wilayah dan kondisi alamiah Kabupaten Melawi yang masih dapat dikembangkan dan diarahkan; Rencana pengembangan (masterplan atau RIPPDA) sebagai arahan pengembangan dan kebijakan; Potensi pariwisata yang dapat ditinjau dari keberadaan atraksi, dukungan fasilitas, dan arahan pengembangan infrastruktur; Potensi atraksi yang beragam, seperti potensi alami, budaya, dan buatan dengan dominasi pada potensi atraksi alami seperti hutan, air terjun, dengan kekuatan budaya yang masih cukup terjaga; Hubungan terhadap wilayah propinsi, Kabupaten serta antar negara, khususnya Malaysia dengan telah diberlakukannya VOA di Entikong; Peran

pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai daerah otonomi; Dukungan pemerintah Propinsi dan rencana pemerintah pusat dalam pengembangan Kawasan Timur Indonesia; Keberadaan teknologi informasi sebagai sarana promosi

Kelemahan dan hambatan yang dapat saja membatasi gerak kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten yang sedapatnya di tanggulangi, antara lain adalah: Adanya kesamaan atraksi pariwisata dengan daerah lain baik didalam propinsi maupun di Pulau Kalimantan, sehingga atraksi yang ditawarkan tidak orisinal dan biasa saja; Keberadaan investasi dan promosi menarik investor atau dana yang masuk untuk mengembangkan destinasi wisata belum maksimal; Infrastruktur yang tidak memadai, dan tidak baiknya kondisi jalan serta pencapaian ke lokasi wisata; Fasilitas pariwisata yang sebaiknya dikembangkan dan dipelihara; Masih rendahnya kesadaran pariwisata untuk masyarakat lokal, mereka masih memikirkan masalah hidup untuk mata pencaharian dan usaha; Rendahnya pengelolaan, pengemasan, dan penataan beberapa atraksi wisata yang ada sekarang, inventaris, belum dikembangkan dan dikelola dengan baik; Belum efektifnya promosi teknologi informasi mengenai bahasa dan gencarnya promosi; Belum optimalnya pengelolaan usaha jasa dan sarana wisata; Kualitas SDM lokal yang belum memadai sebagai usaha keberlanjutan.

Memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan objek daya tarik wisata di Kabupaten

Melawi menggunakan analisis SWOT. Kebijakan pariwisata di Kabupaten Melawi merupakan rumusan yang menjadi arahan pihak-pihak terkait untuk bertindak dalam sektor pariwisata. Kebijakan secara umum mencoba untuk menjawab dan mencapai tujuan telah ditetapkan, dimana pengembangannya diharapkan mempunyai kesesuaian terhadap aset, pasar, lingkungan alamiah, dan lingkungan eksternal lainnya, sehingga mempunyai daya saing, prediktibel, dan kontekstual terhadap kebijakan nasional. Selain itu kebijakan akan berkembang seiring dilakukannya survei, analisa, dan pertimbangan dari analisa tersebut diarahkan menjadi sebuah konsep. Konsep tersebut kemudian dikembangkan dengan lebih detil terhadap strategi yang akan dilaksanakan yang mempunyai kesesuaian terhadap peluang dan hambatan eksternal dan internal kapariwisata di Kabupaten Melawi

Penerapan kebijakan dan strategi dikembangkan didalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Melawi, secara substansi ditekankan pada lima (5) unsur perencanaan pariwisata di kembangkan dalam beberapa aspek, yaitu: (1) Unsur wilayah dan daya tarik, meliputi distribusi atraksi, penzoningan dengan tema dan ciri khas masing-masing sebagai penarik dan pembeda; (2) Distribusi fasilitas dan akomodasi sebagai unsur pendukung kegiatan pariwisata; (3) Jalur aksesibilitas dan jaringan transportasi, merupakan hubungan antar kegiatan yang berlangsung didalam pariwisata; (4) Teknik dan strategi promosi terhadap

target-terget pengunjung atau sumber wisatawan; (5) Pengelolaan menekankan pada institusi, bagaimana sebaiknya mengelola pariwisata.

Perencanaan Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Melawi terintegrasi dan komprehensif, merupakan perencanaan berhubungan kesatuan sistem dari rencana-rencana dasar lokal, regional, sampai nasional, yang kemudian memberikan dan mempengaruhi pola dan gambaran atas perencanaan di lakukan dalam level tertentu. Selain itu elemen-elemen institusional, lingkungan, dan sosial ekonomi juga ikut didalam pertimbangan pengembangan. Kebijakan nasional menjadi pertimbangan dasar detil masing-masing kebijakan propinsi dan karakter wilayah. Sehingga tingkat perencanaan sesuai dari atas ke bawah, sebaliknya, mempunyai hubungan korelasi antara dalam rencana nasional secara umum

Perencanaan berfokus pada masyarakat, perencanaan pariwisata, sepantasnya memang harus memiliki keterlibatan masyarakat serta pengambil keputusan, sehingga tidak terjadi konflik ketika rencana tersebut dilaksanakan karena telah terjadi kesepakatan.

Keikutsertaan masyarakat dapat ditekankan dengan melihat kesiapan sumber daya, pendidikan, dan karakter usaha atau mata pencaharian sehingga diambil kesesuaian. Masyarakat juga berhak berperan memberi masukan dalam bentuk-bentuk tertentu, baik perorangan maupun kelompok. Sebaiknya rencana pariwisata dan pengembangannya juga berdampak pada munculnya apsek penarik investasi yang masuk, sehingga



modal atau kapital dapat masuk dan meningkatkan perekonomian masyarakat, memberikan kontribusi peningkatan ekonomi. Hal ini ditunjang dengan penekanan terhadap usaha dan jasa pariwisata dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah, untuk menarik turis, kegiatan perdagangan, dan investasi tersebut butuh informasi dan promosi untuk menarik investasi

Konsep ditekankan menjadi arahan kebijakan terbagi berdasarkan komponen pengembangan pariwisata yang berada di Kabupaten Melawi, terbagi atas: Destinasi Pariwisata (Atraksi, Amenitas fasilitas, aksesibilitas); Industri Pariwisata (usaha pariwisata, asosiasi); Pemasaran; Kelembagaan. Unsur Perwilayahan dan Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Malawi, difokuskan pada destinasi unggulan telah eksis, didukung dan dikembangkan distribusi ke masing-masing atraksi di daerah lainnya.

Pengembangan daya tarik atau atraksi wisata berdasarkan atas kondisi alamiah baik alam maupun budaya, dengan penekanan pada ekowisata, geowisata, dan wisata budaya disesuaikan karakteristik wisatawan. Masing-masing daerah atau Kecamatan ditekankan pada tema khusus dan ciri khusus menjadi pembeda antara masing kawasan maupun daerah.

Strategi pengembangan Unsur Perwilayahan Dan Daya Tarik wisata di Kabupaten Malawi adalah: (1) Menjadikan hutan, kebun, pertanian, topografi, dan kondisi alamiah lainnya menjadi potensi utama dan penggerak pengembangan atraksi fokus pada hutan cagar, hutan konservasi, pemandangan,

dan wisata agro bertumpu konservasi lingkungan, (2) Mengembangkan kebudayaan etnis Dayak dan Melayu dan lainnya baik fisik maupun non fisik dalam ranah potensi pariwisata dapat tampil dan dipromosikan, pada konservasi, (3) Pengembangan wisata khusus seperti Pembangunan Museum agar lebih dikenal masyarakat dan dipromosikan secara baik sehingga menjadi andalan Kabupaten juga contoh dalam ranah nasional, (4) Penekanan terhadap tema-tema hutan dan taman nasional, wisata agro, dan wisata berbasis air yang dikemas dalam ekowisata, (5) Menetapkan pusat utama zona adalah Kabupaten Melawi dengan pusat sub pengembangan (*urban tourism*) pada masing-masing kecamatan yang dapat diakses oleh jalur darat, (6) Mendorong penggunaan transportasi sungai sebagai wisata penelusuran sungai, (7) Mendorong kawasan perbatasan sebagai kawasan muka, yang dilengkapi dengan pusat informasi dan wisata-wisata khusus yang sesuai dengan karakter wisatawan Malaysia yang dilengkapi dengan kegiatan belanja dan tamasya, (8) Pembangunan fisik yang sesuai dengan kapasitas lingkungan dan berciri kedaearahan.

Strategi Pengembangan Unsur Perwilayahan Dan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Malawi cukup prospektif. dikembangkan antara lain adalah Objek wisata Bukit Matok dan sepanjang aliran Sungai Pinoh untuk olah raga arung jeram. Di Kecamatan Pinoh Selatan objek wisata sejarah berupa ziarah makam temenggung. Di Kecamatan Tanah Pinoh objek wisata sejarah berupa makam raja - raja.

Dari potensi maksud kunjungan dari beberapa pasar utama dan potensial yang ada di Kalimantan Barat pada umumnya, dan Kabupaten Melawi pada khususnya, motivasi utama adalah berlibur dan yang kedua adalah berbisnis. Wisata yang kerap kali menjadi sasaran utama atau aktivitas yang dilakukan adalah: Tamasya/liburan, Belanja, Pelatihan/pendidikan, Olahraga, Kesehatan, Konvensi/bisnis, Mengunjungi teman dan relasi. Dari kesemua maksud kunjungan tersebut, memang didapati sebagian besar merupakan wisata buatan tidak alamiah. Dari beberapa dasar tersebut, kiranya keberadaan fasilitas dan infrastruktur yang ada di kota Kabupaten Melawi, akselerasi dari perkembangan wisata kota ini akan dapat lebih ditingkatkan.

Secara umum kebutuhan akomodasi dalam satu tahun atau pertahun dapat di tekankan pada kebutuhan tempat tidur dan jumlah kamar. Beberapa data yang digunakan adalah jumlah wisatawan, rata-rata lama tinggal, jumlah malam, dan tingkat okupansi. Akomodasi dapat berupa bermacam-macam tipe seperti hotel berbintang, hotel non-bintang, villa, airport hotel, hotel konvensi, dan lain-lain, sehingga pertimbangan perencanaan dan perletakan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah dengan karakternya serta dengan dominasi atau kecenderungan wisatawan yang datang untuk tujuan tertentu, sehingga distribusi dapat merata dan sesuai. Data untuk akomodasi/hotel di Kabupaten Melawi terdapat kurang lebih 18 buah yang tersebar di masing-masing Kecamatan dan yang paling banyak (12 buah) berada di Nanga Pinoh. Peningkatan jumlah

tempat tidur dan kamar bermacam-macam tema akomodasi seperti hotel pertemuan (Hotel Limur Bernaung), dan lain-lain. Peningkatan kualitas berstandar nasional atau internasional serta kategori hotel mempunyai banyak pilihan serta harga, sesuai karakteristik wisatawan.

Strategi pengembangan fasilitas dan akomodasi dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Melawi adalah: (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas akomodasi yang disertai dengan pengadaan pendukung lainnya, seperti kesempatan belanja, (mini market) yang sudah mulai berkembang di Kabupaten Melawi, (2) Memberikan macam pilihan akomodasi dengan harga dan kategori yang berbeda, sehingga dapat ditekankan pada macam-macam segmentasi pasar, (3) Meningkatkan jumlah dan pilihan kuliner, (4) Memperbanyak atau menghususkan kawasan khusus untuk penjualan cinderamata. Untuk cinderamata ini di Kecamatan Pinoh Selatan sudah ada kerajinan Mandau, (5) Memberikan layanan terhadap jasa *tour & travel*, pusat informasi, tempat penukaran uang, dan pengembangan pintu masuk, (6) Memberikan layanan air bersih, listrik, pembuangan yang optimal sehingga tidak mengganggu lingkungan dan kegiatan pariwisata.

Kabupaten Melawi telah memiliki beberapa hotel non bintang yang sekelas hotel melati, terdapat kurang lebih 20 buah. Disamping itu juga memiliki beberapa rumah makan dan restoran atau fasilitas yang menyediakan makan dan minum yang sebagian besar berada di Kabupaten Melawi, dan memang secara

umum distribusi fasilitas lebih banyak terkonsentrasi di Nanga Pinoh. Beberapa wisata kuliner andalan Kabupaten Melawi adalah: menggunakan beras local, dendeng Rusa, kuliner Ikan Semah, Bingka khas Melawi dan Empek – Empek khas Melawi. Beberapa fasilitas yang tidak teridentifikasi adalah: Tour and travel, Pusat informasi pariwisata, Tempat penukaran uang, Keamanan pariwisata, Fasilitas yang berada di pintu masuk/keluar. Yang menjadi perhatian juga banyaknya fasilitas yang hanya tersebar disatu tempat yaitu Nanga Pinoh yang menjadi ibukota Kabupaten. Hal ini memang dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dengan dilengkapinya kawasan/daerah tersebut dengan fasilitas-fasilitas penunjang sehingga menjadi faktor pendorong kemajuan. Dari beberapa informasi tersebut sekiranya yang masing-masing Kecamatan atau daerah yang ada di Kabupaten Melawi sedapatnya memberikan kontribusi dan diberikan jangkauan distribusi pelayanan yang lebih merata, sehingga semua kebutuhan dapat di dukung. Apabila tidak terjadi distribusi yang merata, perlu dipertimbangkan pemantapan jalur transportasi atau hubungan diantaranya. Selain itu penempatan dan dukungan fasilitas lainnya belum teridentifikasi sebaiknya juga di siapkan, sambil memperbaiki kualitas fasilitas yang telah ada

Pengembangan Aksesibilitas dan Jaringan Transportasi ditujukan untuk menyatukan wilayah pengembangan pariwisata dengan jaringan transportasi yang layak dan sesuai bagi kendaraan dan pejalan kaki, dengan pengembangan titik-

titik area istirahat agar tidak terjadi kelelahan dalam perjalanan yang memakan jarak panjang. Strategi dikembangkan adalah pusat penyebaran adalah Ibukota Kabupaten (Nanga Pinoh) dan didistribusikan pada masing-masing daerah dengan sub-pengembangan khusus dan tema khusus, peningkatan kualitas jalan kendaraan dan memberikan ruang bagi pejalan kaki dan sepeda, penyediaan angkutan utama menuju Kabupaten Melawi, angkutan lokal ke seluruh daerah/wilayah, serta angkutan dalam lokasi mempunyai ciri khusus dan spesifik.

Terminal, halte, Bandara dan prasarana angkutan yang mempunyai kualitas baik dan terhubung terhadap seluruh sistem transportasi yang ada, sehingga semua kawasan dapat dicapai disertai dengan peningkatan aksesibilitas udara pada khususnya. Rute yang cukup jauh diberikan sarana istirahat diantara masing-masing daerah/kawasan dengan fungsi taman, pemandangan, dan rumah makan, kemudahan dan kemenarikan pintu masuk utama, baik antar Kabupaten maupun Propinsi serta mengembangkan usaha jasa transportasi pariwisata. Pada dasarnya transportasi di Kabupaten Melawi dapat dibagi menjadi 3 sarana, yaitu darat, laut dan udara.

Secara umum Kabupaten Melawi dapat diperhitungkan bahwa jalan yang baik beraspal sekitar 21,02% dan sisanya adalah jalan berbatu dan tanah sudah tentu dapat menghambat transportasi, apalagi ditambah datangnya musim hujan. Untuk wilayah ibukota Kabupaten (Nanga Pinoh) hampir 70% jalan yang ada dalam kondisi baik dan semua beraspal,

tidak ada yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Kecamatan Belimbing yang mempunyai jalan dengan kondisi beraspal dan baik, selain rata-rata Kecamatan mempunyai jalan beraspal kondisi sedang sampai rusak, serta dengan perkerasan sampai jalan tanah. Hubungan jalan darat dihubungkan langsung terhadap Kabupaten lain yang ada, sampai ke Pontianak (373 km), dan dengan jarak terjauh di dalam Kabupaten Melawi sendiri yaitu Kecamatan Sokan yang berkisar 475 km. Transportasi darat di Kabupaten Melawi tepatnya kondisi jalan perlu di perbaiki dan dikembangkan kondisi layak dan baik untuk kendaraan dan pejalan kaki dapat menghubungkan semua wilayah Kecamatan hingga perbatasan Kabupaten lainnya

Transportasi sungai juga potensial dan banyak digunakan oleh masyarakat sehari-hari, dengan indikator bahwa sarana transportasi umum yang paling banyak digunakan masyarakat adalah motor air dan paling banyak terdapat di Kecamatan Nanga Pinoh. Selain itu yang menjadi faktor berkembangnya sarana ini adalah bahwa hampir sebagian besar wilayah kota Kecamatan di Kabupaten Melawi dilalui oleh sungai/perairan.

Bandara di Nanga Pinoh tidak beroperasi, sebagai pintu masuk utama dari udara ke Kabupaten Melawi, adalah melalui Bandara Tebelian yang ada di Kota Sintang juga berperan penting, walaupun pada beberapa tahun ini mengalami tingkat penurunan, dan lebih banyak yang keluar/pergi daripada yang datang (kedatangan). Bandara ini melayani rute ke Pontianak. Merujuk pada RPJM Kabupaten Melawi memang

terdapat rencana untuk merelokasi Bandara di Nanga Pinoh dikarenakan kondisi dan manajemen yang tidak layak lagi, namun yang terpenting lagi adalah bagaimana menarik pendatang dalam kasus ini adalah wisatawan dari segi faktor eksternal bandara yang kemudian bersama-sama mulai diperbaiki, bahkan direlokasi seiring dengan meningkatkan kedatangan. Selain itu juga perlu di beri dukungan terhadap akses selanjutnya dari bandara seperti keberadaan transportasi lokal, pusat informasi, dan akomodasi

Kebijakan pemasaran dan promosi dalam pengembangan objek daya tarik wisata di Kabupaten Melawi adalah mengembangkan strategi promosi sesuai pangsa pasar dan segmentasinya disesuaikan terhadap produk, harga, lokasi wisatawan, dan cara pendekatan. Mengembangkan promosi terhadap daya tarik spesifik dan mempunyai ciri tersendiri dibanding daya tarik serupa. Strategi yang dilakukan adalah: memasarkan dengan tema dan tampilan natural, kondisi alamiah daerah dan budaya setempat, memasarkan pada sumber wisatawan utama dan potensial, untuk mancanegara, fokus pada Malaysia, Brunei. Untuk nusantara di fokuskan pada Pulau Kalimantan dan DKI Jakarta, pemasaran dan promosi pariwisata masuk kedalam agenda pemasaran potensi lainnya, seperti investasi, perdagangan, pendidikan, membentuk badan khusus pemasaran dan promosi merancang materi promosi sesuai pasar dan karakter setempat, penentuan harga kompetitif dan sesuai, untuk wisatawan mancanegara maupun nusantara, sehingga masing-masing segmen

mempunyai harga sesuai nilai tukarnya. Pengembangan dan penekanan terhadap informasi dapat sampai ke wisatawan maupun target pengunjung. Pemerintah, swasta, dan organisasi pariwisata yang ada bersama-sama dan saling mendukung untuk memberi informasi bagi wisatawan sehingga pariwisata di Kabupaten Melawi dapat diketahui dan dikenal, mulai dari negara/daerah tempat asal wisatawan, samapi saat mereka ada didestinas wisata. Media informasi antara lain: Iklan, Pameran, Peta-peta wisata, Buku petunjuk, Video, Majalah dan artikel, Brosur, Seminar, Pusat informasi.

Promosi dapat dilakukan dengan beberapa media, antara lain: iklan, publikasi, publik relation, dan insentif (*discount* dan hadiah). Promosi pariwisata dilakukan setelah atraksi, pelayanan, dan transportasi dirasakan telah memadai. Promosi harus dilengkai dengan inforamasi kepada wisatawan agar mendapat perhatian. Hal yang pertama menjadi pertimbangan adalah identifikasi pasar target (karakter dan segmentasi) yang kemudian disiapkan bahan-bahan mengeniannya. Konsep promosi secara detil dapat dilakukan dengan pendekatan, diantaranya adalah: Iklan, dapat menjangkau secara luas dan cepat. *Personal selling*, dapat menciptakan transaksi secara langsung dan interaktif. *Direct marketing*, membangun relasi berkelanjutan dan menyasar target secara individu. Internet, dengan jumlah pengunjung situs dapat diukur, serta dapat diubah baik penampilan maupun substansi cepat dan murah. Publikasi, tingkat kepercayaan target terhadap pesan tinggi. *Sales promotion*, memberikan

insentif dan efeknya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek.

Kegiatan distribusi produk wisata kepada calon wisatawan disesuaikan permintaan pasar. Penyesuaian tersebut dilaksanakan dua arah, yaitu: Pertama, menyesuaikan produk wisata permintaan pasar, kegiatan ini disebut promosi. Promosi sebaiknya diarahkan pada produk berkaitan antara atraksi, bagaimana menuju, dan fasilitas yang ada. Kedua, penyesuaian permintaan dengan produk wisata, kegiatan ini disebut publikasi. Publikasi dapat berupa: Leaflet, Brosur, Pameran, Media masa, Radio, Film dan televisise, Internet.

Secara umum promosi dan publikasi yang dilakukan dapat dilakukan kordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai satu kesatuan unsur wilayah. Pendekatan promosi dan publikasi pariwisata Kabupaten Melawi dapat dilakukan sebagai berikut: dilakukan kordinasi/kerjasama terhadap Propinsi maupun pusat, dengan materi promosi yang diandalkan, namun kondisi sesuai material promosi atau publikasi, karena secara umum, sebagian besar pndatang mendapatkan informasi melalui kenalan/teman yang telah berkunjung, sehingga kesan yang didapat menjadi penting. Penggunaan media internet dan iklan dengan bahasa internasional, disertai dengan undangan dan open house. Pasar wisatawan nusantara juga dapat dilakukan dengan pendekatan kerjasama pemerintah Propinsi. Selain itu dapat dilakukan beberapa kegiatan lain seperti: mengikuti pameran pariwisata maupun investasi tingkat nasional, promosi langsung (*public*

*relation*) ke daerah tertentu terhadap perusahaan dan sekolah, penggunaan media masa, majalah, dan internet.

Kebijakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mendukung pengembangan objek daya tarik wisata di Kabupaten Melawi yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bergerak di sektor pariwisata dengan pelatihan dan pendidikan, disertai dengan sosialisasi dan informasi pariwisata terhadap masyarakat sebagai tuan rumah.

Masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pembangunan dan perencanaan pariwisata dalam bentuk keikutsertaan organisasi masyarakat, dengar pendapat, dan lain-lain, Peningkatan kordinasi antar instansi, antar wilayah, propinsi dan antar negara dalam promosi dan pengembangan pariwisata, disertai adanya badan promosi atau kerjasama pariwisata, Peningkatan kemitraan terhadap institusi, organisasi, dan swasta yang berkaitan dengan perencana, pengelola, pengawasan, pendidikan dan evaluasi pariwisata yang dibagi dan mempunyai kesesuaian dengan porsi tugas dan kewajiban masing-masing

Beberapa tipe pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia yang bergerak di bidang pariwisata di Kabupaten Melawi dapat diselenggarakan dengan beberapa bentuk, diantaranya adalah: Pada lokasi internal, pada masing-masing institusi atau perusahaan, seperti hotel dan restoran, Pelatihan pendek dengan materi baru maupun update, Pengembangan pendidikan formal dari institusi atau

perusahaan seperti hotel atau vokasi (kejuruan). Kerja sama pendidikan setingkat universitas, dalam maupun luar daerah, Study tours. Kunjungan dan pelatihan singkat terhadap lokasi spesifik tertentu, Program komprehensif, yaitu program pendidikan yang tergabung pendidikan resmi, latihan, dan magang.

Profesionalisme Aparatur Pemerintah belum memadai. Kurangnya kesempatan Aparatur Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mengikuti kursus/Pendidikan teknis diadakan oleh lembaga berkompeten. Kualitas SDM Pelaku Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga masih dirasakan rendah. Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah, etos kerja yang rendah, pola kerja subsistensi dan belum tersentuh oleh program-program pemberdayaan berimplikasi terhadap produktifitas dan kreatifitas dalam berusaha. Salah satu sumber daya untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah diuraikan di atas adalah sumber dana. Sumber dana tersebut, telah dituangkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Melawi tahun 2022 yang merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Melawi tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Prosedur Pelaksanaan Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Oleh Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Melawi didukung komitmen yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Melawi sebagai Tujuan Pariwisata tertuang dalam Visi dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. Unsur Perwilayahan dan Daya

Tarik serta Fasilitas dan Akomodasi, permasalahan yang maiz dihadapi adalah Tidak Adanya Payung Hukum; Kurangnya pemahaman arti pentingnya pemeliharaan lingkungan objek wisata; serta Belum tersusunnya profil ODTW.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Oleh Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Melawi yaitu terbatasnya Aksesibilitas dan Jaringan Transportasi, belum optimalnya Pemasaran dan Promosi, serta Sumber Daya Manusia serta Anggaran. Aspek yang berhubungan dengan kelembagaan (pemahaman aparaturnya terhadap konsep dan definisi kawasan wisata serta koordinasi antar instansi terkait), kebijakan dan regulasi pengelolaan kawasan wisata (tingkat lokal, daerah, nasional dan internasional). Aspek internal meliputi sumber daya manusia seperti tingkat pengetahuan aparaturnya serta partisipasi penduduk lokal dalam pengelolaan kawasan wisata, kondisi sarana dan prasarana, dan kondisi objek wisata yang dikembangkan. Untuk mengatasi Belum optimalnya Prosedur Pelaksanaan Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Oleh Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Melawi perlu peningkatan partisipasi para pihak pemeliharaan lingkungan objek wisata. Mewujudkan sasaran khusus tersebut perlu dilakukan terwujudnya Peningkatan Pemahaman Arti Pentingnya Pemeliharaan Lingkungan Objek Wisata melalui penyuluhan mengenai Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW), melaksanakan sosialisasi, serta meningkatkan koordinasi

dengan pemerintah setempat (desa, kelurahan, Dusun, RW, RT) dalam pemeliharaan lingkungan objek wisata. Pengembangan kawasan wisata hendaknya Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Melawi memberikan bimbingan dan pelatihan teknis kepada aparaturnya maupun warga masyarakat sekitar kawasan tersebut. Melakukan kerjasama pihak ketiga (investor) untuk mengembangkan Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dimaksud.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daliyo. 2003. *Kualitas SDM Pariwisata Era Otda Dan Globalisasi*. Jakarta: Pustaka sinar Harapan.
- Hidayati dkk. 2003. *Ekowisata, Pembelajaran Dari Kalimantan Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Triutomo, S. 2001. Pengembangan Wilayah Melalui Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Dalam *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah; Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi*. Penyunting: Alkadri, Muchdie, Suhandjo. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta.
- Yoeti, O. 1999. *Industri Pariwisata Dan Peluang Kesempatan Kerja*. Jakarta: PT Pertja.
- Yoeti, O. 2000. *Ekowisata, Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Pertja.
- Yoeti, O. 2001. *Pariwisata, Sejarah, Perkembangan Dan Prospeknya*. Jakarta: PT Pertja.